

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- AA. Qadri, 1987, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, Yogyakarta, PLP2M
- Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Bandung, Alumni.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- , 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Agus Dwiyanto, 2008, *Reformasi Birokrasi Publik Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses
- Ali Mansyur, 2010, *Aneka Persoalan Hukum (Masalah Perjanjian, Konsumen dan Pembaharuan Hukum)*, Universitas Negeri Islam Sultan Agung, Semarang
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta, Pradnya Paramita
- , 2014, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta, RajraGrafindo Persada.
- Andi Mulyono, 2016, *Pengaruh Aspek Kultur Hukum Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia*, Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Anshorudin, 2010, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, (Jakarta, Oborku, 2015).
- Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, Bandung, Alumni
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- , 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1993, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Buku Saku, 2010, *Memahami Gratifikasi, Ed 1*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Callete Nat. J dan Umar Kayam, 1987, *Kebudayaan dan Pembangunan, Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor.
- Cansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia
- Cambridge University, 2007, *Cambridge Advanced Learner's Dictionary 2th Edition*, Cambridge University Press.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama.
- David Jarry and Julia Jary, 1991, *Dictionary of Sociology*, London, Harper-Collins Publishers.
- Deddy Mulyana, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Orsdakarya
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Defid Tri Rizky, 2012, *Sistem Pengembalian Beban Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Studi Kasus Perkara Korupsi Atas Nama Terdakwa Syarifudin*, Tesis, Depok, Universitas Indonesia.
- Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Diaz Nurima Sawitri, 2008, *Penegakan Hukum Korupsi Dalam Bentuk Gratifikasi di Indonesia Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum*, Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII.
- Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta

Djoko Prakoso dan Ati Suryati, 1986, *Upetisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bina Aksara, Jakarta.

-----, 2010, *Hukum Penintesis di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty

Dodik Prihatin, *Tinjauan Yuridis Mengenai Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*, Bandung, Alumni.

Doni Muhandiansyah, 2010, *Buku Saku, Memahami Gratifikasi*, Cetakan Pertama, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Eddy, OS, Hariej, 2009, *Asas legalita dan Penentuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta

Emeritus Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, 2012, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Jakarta, Fikahati Aneska.

Etty Indriati, 2013, *Korupsi, Pemerintah, dan Korporasi, Modus Operandi dan Pencegahan Korupsi Sektor Kesehatan*, Yogyakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Fahmi Hidayat, 2016, *Perlindungan Hak-Hak Tersangka Korupsi Pada Tahap Penyidikan Dan Penuntutan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Fatkhuri, 2018, *Korupsi Dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya*, Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional

Faturochman, 1999, *Keadilan Perspektif Psikologi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Friedmann, Lawrence M., 2011, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Bandung, Nusamedia.

Hadi Sutrisno, 2006, *Metodologi Research 2*, Yogyakarta, Andi Offset.

Hamka, 1983, *Tafsir Al-azhar Jus V*, Jakarta, Pustaka Panji Mas

Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media

Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul Minnesota.

Hariman Satria, 2012, *Penerbitan SKPP oleh Kejaksaan dalam Proses Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Genta Publishing.

-----, 2017, *Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian*, Jurnal Integritas, Jakarta, KPK.

Hurgronje, C. Snouck, 1997, *Aceh, Rakyat dan Adat Istiadatnya Jilid I*, Jakarta, INIS.

Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, Jurnal, 2017, *Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif*, Surabaya, Universitas Airlangga.

Iman Sudiyat, 1991, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Indriyanto Seno Adji, 2006, *Korupsi, Kebijakan, Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta, Diadit Media.

Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher.

James C. Scott, 1983, *Moral Ekonomi Petani*, Jakarta, LP3S.

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2009, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Malang, Alumni

Jimly Asshiddiqie, 2009, *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*, Jakarta, Rajawali Press

-----, 2012, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum, dalam Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, Menyambut 73 Tahun Prof. Dr.H. Muhammad Tahir Azhary*, Jakarta, Prenada Media Group

John Rawls, *A Theory of Justice*, London, Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Juni Sjafrien Jahja, 2013, *Prinsip Kehati-hatian dalam Memberantas Manajemen Korupstif pada Pemerintahan dan Korporasi*, Jakarta, Visimedia

Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta, Kalam Mulia.

Karjadi, *Polisi (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya)*. Bogor Politea. 1978.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014, *Buku Saku Memahami Korupsi*, Jakarta, KPK.

-----, 2015, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, Jakarta, KPK.

Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law*, New York, W.W. Norton and Company

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2014, *Tafsir Al-Quran Tematik*, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamil Pustaka, Edisi Revisi

L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, cetakan kedua puluh enam

Leden Marpaung, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta, Sinar Grafika

Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung, Alumni.

-----, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Alumni.

Loebby Loqman, 1995, *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta, Universitas Tarumanegara.

Madjid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Surabaya, Risalah Gusti

M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Maihasni, 2010, *Eksistensi Tradisi Bajapuik Dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat*, Disertasi Bogor, Institute Pertanian Bogor.

Maria Theresia Geme, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Atau Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung, Mandar Maju.

Mia Amiati Iskandar, 2013, *Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCAC 2000 dan UNCAC 2003*, Jakarta, Referensi.

Michael Quinn Patton, 2002, *Qualitative Research and Evaluation Methods*, 3rd Edition, Thousand Oaks California, Sage Production, Inc.

Moeljatno, 1983, *Asas-asas hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara

Moh. Mahfud. MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, Rajawali Pers.

Muhammad Fuat Widyaiswara Utama, 2013, *Mengenal Proses Pencucian Uang (Money Laundering) dari Hasil Tindak Pidana*, Jakarta, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.

Muhammad Yamin, 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid I*, Djakarta, Jajasan Prapantja.

-----, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung, Pustaka Setia.

Muhammad Yusuf, 2013, *Merampas Asset Koruptor*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas

Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni

Murtadha Muthahhari, 1995, *Keadilan Ilahi, Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung, Mizan.

Natasha Hamilton, 2001, *Anti Corruption Strategies In Indonesia*, Singapore, Bulletin of Indonesian Economic Studies

O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media.

Ohan Mulyana, 2014, *Pembuktian Terbalik Berimbang dalam Perkara Pencucian Uang dengan Terdakwa Bahasyim Assifie*, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009).

Paul B.Hortory Chester L.Hunt, 1999, *Sosiologi*, Terj. Drs.Aminuddin Ram, M.Ed. Dra.Tita Sobari, Jakarta, Penerbit Erlangga.

Pelras Christian, 1981, *Hubungan Patron-Klien Dalam Masyarakat Bugis dan Makasar*, Melbourne, Monash University.

Permanasari Arianti, 2008, *Makna dan Tradisi Perayaan Tahun Baru Imlek, Studi Kasus Pada Beberapa Warga Etnis China di Kota Bogor*, Skripsi, Jakarta, Universitas Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta, Rajawali

Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu

R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sartono Kartodijjo, 1987, *Gotong - royong, Saling Menolong Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor.

S.F. Marbun, dkk, 2004, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta

Salim H.S, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Press

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta , Genta Publishing.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti

Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa

Sayyid Quthb, 1994, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung, Pustaka.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali.

-----, 1985, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta, Rajawali.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Rajawali.

Sudarto, tt, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Soedarto

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Sudiyat Imam, 1981. *Asas-asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*. Yogyakarta, Liberti.

Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

Sunyoto Usman. 2004. *Sosiologi; Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta, Center for Indonesian Research and Development (CIReD). Cetakan Pertama.

Surya Adi, 2002, *Apa dan Bagaimana Reformasi*, Jakarta, Pustaka Intan.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Press

-----, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila*, Bandung, Media Perkasa.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2011, *Ilmu Hukum dan filsafata Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Cetakan Keempat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.

Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum berdasarkan Pancasila*, Bandung, Nusa Media

Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Media Perkasa.

Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Bandung, Nusamedia.

Tim Penyusun, 2015, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tina Asmarwati, 2014, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Deepublish.

Titin Ulfyah, 2017, *Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang dalam Tinjauan Hukum Islam dan Positif*, Semarang, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet VIII, Yogyakarta, Kanisius.

Verhezen, Peter, 2003, *From a Culture of Gifts to a Culture of Exchange (of gifts) An Indonesian Perspective on Bribery*, Jakarta, Antropologi Indonesia.

Vian.T, 2005, *Fighting Corruption in Developing Countries, Strategies and Analysis*, Connecticut, Kumarian Press.

Waqiaturrohmah, 2015, *Tradisi Weh-Wehan Dalam Memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw Dan Implikasinya Terhadap Ukhuwah Islamiyah Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal*, Skripsi, Kendal, UIN Walisongo.

William Shrode & Voich, *Organization and Management – Basic Systems Concept*, Tallahassee. Fl. Florida State University.1974

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Bandung, Eresco



Yrama Widya, 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Grapika.

Van Dijk. 1982. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung.

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **Surat Kabar**

"Kemendiknas harus memperbaiki kebijakan dan mekanisme pengelolaan dana BOS", dalam *beritasatu.com* 7 Desember 2010.

"Bermula dari Keluguan Agus Condro", dalam *Tribunnews* 12 Desember 2011.

"Waspada! Kecurangan di Jalur Undangan SNMPTN", dalam *Oke News* 12 Juli 2012.

"Ratu Atut dan Politik Dinastinya", dalam *Tempo*, 20 April 2014.

"Penerimaan Siswa Baru Rentan Praktik Korupsi", dalam *sundersatu.com* 28 Mei 2015.

"2.125 Dokter Diduga Terima Suap Obat Rp 131 M" dalam *Tempo* 2 November 2015.

"Suap Obat, Dokter Terima Mobil Yaris hingga Camry", dalam *Tempo* 3 November 2015.

"KPK, Layanan Publik Jadi Lahan Korupsi", dalam *Kabar Banten* 25 September 2017.

"Menolak Menyuar, Karyawan Perusahaan Farmasi Dipecat", dalam *Tribunnews* 19 Oktober 2017.

"Siapakah yang Berhak Mendapatkan SKTM?", dalam *Kompas* 11 Juli 2018.

Abdul Kadir, "KPK Tahun Ini Bakal Punya Sembilan Kantor Perwakilan", dalam *Antara News* 17 April 2018.

Ajeng Rizka, "KPK Resmikan Rumah Tahanan Baru Buat Koruptor Negeri Ini", dalam *Tempo* 6 Okt 2017.

Amirullah, "KPK, Pabrik Farmasi di Palembang Beri Rp 600 M ke Dokter" dalam *Tempo* 25 Oktober 2016.

Bambang Widjojanto, "KPK Belum Mampu Terapkan Pembuktian Terbalik untuk Anas" dalam *Suara Pembaruan*, 6 Juli 2012.

Farid Assifa, "Seorang Kapolsek Daftarkan Anaknya ke SMA dengan Surat Miskin", dalam *Kompas* 10 Agustus 2018.

Ferian Syach, "Korupsi dalam Bidang Pendidikan", dalam *Kompas* 8 November 2013.

Fatmah Afrianty Gobel, "Korupsi Pada Sektor Kesehatan", dalam *Kompas* 13 Desember 2011.

Imam Hamdi, "Banyak Gratifikasi di Sekolah, Ibu Ini Ajak Anaknya Demo", dalam *Tempo* 18 Februari 2016.

Imam Suropto, "Tersangka Dugaan Korupsi Dana BOS di Brebes Kembalikan Rp 500 Juta", dalam *Detik News* 16 Oktober 2018.

Indra Akuntono, "Kecurangan SNMPTN Jalur Undangan Tak Bisa Dipantau", dalam *Kompas* 14 Februari 2012.

Karresa Esa, "Waspadalah dengan Budaya Parcel", dalam *Kompasiana* 7 Agustus 2012.

Muhammad Bunga Ashab, "Diduga Pungli, Mantan Kepala SMKN 1 Bintang Dijebloskan ke Rutan", dalam *Sindo* 1 November 2018.

Muslimin B. Putra, "Pemberantasan Pungli Di Sekolah", dalam *Berita Ombudsman RI* 17 September 2019.

Nazar Nurdin, "Pertahankan Jabatan, Kepala Sekolah Setor Upeti Rp 10 Juta ke Bupati Klaten", dalam *Kompas* 12 Juni 2017.

Robertus Belarminus, "Saut Situmorang, Pegawai KPK Seharusnya 8.000 Orang", dalam *Kompas* 16 Agustus 2017.

Sabir Laluhu, "Korupsi Bidang Kesehatan Masih Marak", dalam *Sindo News* 8 Januari 2018.

### **Artikel Jurnal**

*Agustina Wati Gubali*, Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia, *Lex Crimen*, Volume II, Nomor 3, Juli 2013, Manado, Universitas Negeri Sam Ratulangi, 2013.

*Ardi Ferdian*, Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi, Arena Hukum, Volume 6, Nomor 3, Desember, Malang, Universitas Brawijaya, 2012.

*Bangladesh University*, India Prevention of Corruption Act Chapter III section 7 point b Number 49 of 1988.

*Dinda Dinanti dan Yuliana Yuli W*, Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Yuridis, Volume 3, Nomor 2, Jakarta, UPN Veteran, 2016.

*Eugen Ehrlich*, Fundamental Principles of The Sociology of Law, dalam Jurnal Walter L. Moll, 1936.

*Gandes Candra Kirana*, Pembuktian Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Trijurnal, Volume 1, Nomor 1, Jakarta, Universitas Trisakti, 2018.

*Isrotul Fajriyah dan Letjen TNI I Wayan Midhio Supandi Halim*, Pembangunan Perdamaian Dan Harmoni Sosial Di Bali Melalui Kearifan Lokal Menyama Braya, Jurnal Universitas Pertahanan, Vol III, 2017.

*Janpatar Simamora*, Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Purwokerto, FH Unsoed, dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3 September 2014

*Luis Kutner*, Savigny, German Lawgiver, dalam Jurnal Marquette Law Review, Vol. 55, Issue 2 Spring, 1972

*L.H.C. Hulsman*, The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspective dalam Barda N.A. Perkembangan Sistem Pidana, Bahan Penataran Nasional Hukum dan Kriminologi XI Tahun 2005.

*M. Nurul Irfan*, Gratifikasi di Mahkamah Konstitusi dan Wacana Hukuman Mati, Jurnal Hukum Madania, Vol. XVIII, 2014.

*Martin Kryger*, Law as Tradition, Journal of Law and Philosophy, Vol. 5 No. 2 August 1986

*Mason C Hoadley*, “The Leiden Legacy, Concepts of Law in Indonesia (Review)”, Journal of Social Issues in Southeast Asia, Vol. 21 No. 1 April 2006, di download dari <http://muse.jhu.edu/journals/soj/summary/v021/21.1.hoadley.html> diakses tanggal 4 Maret pukul 09.15.

*Nadya Syafira*, Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Maret 2015 di <https://media.neliti.com/media/publications/34368-ID-tinjauan-yuridis-tindak-pidana-menerima-gratifikasi-berdasarkan-undang-undang-no.pdf> diakses 28 Juli 2017.

*Nederlands Tijdschrift Voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie*, Netherlands Journal for Legal Philosophy and Jurisprudence and Proceedings of the Netherlands

Association for the Philosophy Law, Elfde Jaargang  
Tjeenk Willink, Zwolle.

1982, Nr. 1, w.E.J..

*Nurasia Tanjung*, Pembuktian Terbalik Atas Harta Kekayaan Seseorang Tersangka Korupsi, Manado, Unsrat, Lex Crimen Vol. V/No. 2 Februari 2016.

*Reda Manthovani, S.H., LL.M.*, Penerapan Pasal gratifikasi yang dianggap suap dalam Sistem Hukum Indonesia, Makalah Konsultan Ahli untuk Riset Pasal gratifikasi yang dianggap suap ICW, 18 September 2013.

*Wempie J. H. Kumendong*, Suatu Tinjauan Terhadap Pembuktian Dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Karya Ilmiah*, Manado, Universitas Sam Ratulangi, 2016.

*Supriyadi Widodo Eddyono*, Pembebanan Pembuktian Terbalik Dan Tantangannya (Jakarta, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No. 2, Direktorat Jenderal peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Juni 2011.

*Wahyu Wiriadinata*, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian. Jurnal Konstitusi, Bandung, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Vol. 9 no. 2 issn 1829-7706, 2012.

## Internet

[http://majalah.pengusaha\\_muslim.com/hadiah-gratifikasi-dan-suap](http://majalah.pengusaha_muslim.com/hadiah-gratifikasi-dan-suap). Diakses 28 Juli 2017

<http://rektivoices.wordpress.com/2009/05/25/memperluas-makna-gratifikasi>, Widya Ayu Rekti, 28 Juli 2017.

[www.kompasiana.com / benarkah semua dokter adalah pegawai negeri?](http://www.kompasiana.com/benarkah-semua-dokter-adalah-pegawai-negeri/), diakses, pada tanggal 2 April 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ed3a1294d537/gratifikasi-adalah-budaya-bangsa-yang-dikriminalisasi-html>. diakses 28 Juli 2017

[http://www.kesad.mil.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=170,gratifikasi&catid=52,umum](http://www.kesad.mil.id/index.php?option=com_content&view=article&id=170,gratifikasi&catid=52,umum) diakses 28 Juli 2017

<https://indonesiana.tempo.co/read/66862/2016/03/17/antoniputra94/melihat-korupsi-dari-aspek-budaya-html>. diakses 28 Juli 2017.

<https://www.kompasiana.com/yogifebri14/54f78174a333112c6f8b4663/pemilu-dan-patronklien>, diakses Pada Tanggal 10 Maret 2019.

“Agar Gratifikasi Tak Dijadikan Mainan Politik”,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53043515c3c50/agar-gratifikasi-tak-dijadikan-mainan-politik>, diakses pada 8 April 2019.

“Gratifikasi Seksual antara Ada dan Tiada (Sebuah Refleksi Hukum)”,  
<https://www.kompasiana.com/ediboni/598de76ed2808b112800cf93/gratifikasi-seksual-antara-ada-dan-tiada-sebuah-refleksi-hukum?page=all>, diakses pada 8 April 2019.

“Gratifikasi Seks Kerap Terjadi, Kenapa KPK Sulit Membuktikan?”,  
<https://tirto.id/gratifikasi-seks-kerap-terjadi-kenapa-kpk-sulit-membuktikan-dfGV>., diakses 8 April 2019.

“Pasal Gratifikasi Jangan Jadi Celah Korupsi”,  
<https://antikorupsi.org/id/news/pasal-gratifikasi-jangan-jadi-celah-korupsi>, diakses pada 8 April 2019.

“Eksepsi Irman Di Pengadilan Tipikor Yusril, Kpk Sengaja Jebak Irman”,  
<https://www.harianhaluan.com/news/detail/61992/yusril-kpk-sengaja-jebak-irman>, diakses 8 April 2019.

“Kerancuan Pengaturan tentang Gratifikasi yang Dianggap Suap Oleh, Ketut Darpawan”,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58e5f3c74b0f5/kerancuan-pengaturan-tentang-gratifikasi-yang-dianggap-suap-oleh--ketut-darpawan>, diakses pada 8 April 2019.

“KPK Ingatkan Pejabat Negara Tak Terima Parsel Lebaran Apa Pun”,  
<https://news.detik.com/berita/d-3532145/kpk-ingatkan-pejabat-negara-tak-terima-parsel-lebaran-apa-pun>, diakses 8 April 2019.

“Anas dan Akil, Fenomena Berita Korupsi 2013”,  
<https://nasional.kompas.com/read/2013/12/10/1151230/Anas.dan.Akil.Fenomena.Berita.Korupsi.2013>, diakses 8 April 2019.

“Penerapan Azas Pembuktian Terbalik Bagi Tindak Pidana Korupsi”,  
<https://www.rnplawfirm.com/azaz-pembuktian-terbalik/>, diakses 8 April 2019.

“Pro dan Kontra Pembuktian Terbalik”,  
<https://www.kompasiana.com/lukmanjawa/55002230a33311e07250fc5b/p-ro-dan-kontra-pembuktian-terbalik>, diakses, 8 April 2019.

"BPK, Auditor atau Koruptor?" dalam <https://pinterpolitik.com/bpk-auditor-atau-koruptor/>, diakses pada 10 April 2019.

<https://www.sekolahdasar.net/2013/11/dana-bos-digunakan-membiayai-13-komponen-ini.html>, diakses pada 12 April 2019.

*Martua Raja Taripar Laut Silitonga*, "Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Belum Optimal", dalam <https://ugm.ac.id/id/berita/15662> diakses pada 10 April 2019.

*Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I*, "Langkah Hukum yang Harus Ditempuh dalam Upaya Penyelesaian Tunggakan Pembayaran Uang Pengganti", dalam <https://www.kejaksaan.go.id>, diakses pada 10 April 2019.

*M. Yasin dan Nando Narendra*, "Jalan Berliku Menjerat Penerima Gratifikasi" dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses pada 11 April 2019.

*Azromi*, "Larangan Gratifikasi Dalam Birokrasi Pemerintah", dalam <http://jdih.kepriprov.go.id> diakses pada 12 April 2019.